

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdulkadir, Muhamad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004)
- Andi Sofyan dan Abd.Asis, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Jakarta:Prenadamedia Group, 2014)
- Asshiddiqie Jimly, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, (Jakarta: Konpress, 2006)
- Fuady, Munir, Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata, (Bandung : Citra Aditya,2006)
- Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Harahap, M. Yahya,, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP - Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali (Jakarta : Sinar Grafika, 2012)
- Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, (Bandung : Mandar Maju, 2003)
- J.C.T. Simorangkir, dkk., Kamus Hukum, (Jakarta:Aksara Baru, 1983)
- Muladi dan Barda Nawawi, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: PT. Alumni, 2010)
- Mulyadi, Lilik, Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2012)
- Mulyadi, Lilik, Bunga Rampai Hukum Pidana, Prespektif, Teoritis dan Praktik, Cetakan ke-2, (Bandung: PT Alumni, 2012).
- Moelyatno, Hukum Acara Pidana, Bagian Pertama, Seksi Kepidanaan, (Yogyakarta:Fakultas Hukum UGM)
- Nasution, A. Karim, Masalah Surat Tuduhan Dalam Proses Pidana, (Jakarta: CV. Pantjuran Tudjuh, 1981)

Poernomo, Bambang, Pola Dasar Teori dan Azas Umum Hukum Acara Pidana, (Yogyakarta:Liberty,1988)

Raharjo, Satjipto, Penegakan Hukum Sebagai Tinjauan Sosiologis, (Yogyakarta: Genta Publishinh, 2009)

Salam, Moch. Faisal, Hukum Cara Pidana dalam Teori dan Praktik, (Bandung: CV Mandar Maju, 2001)

Serikat Putra Jaya, Nyoman, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) Buku Pegangan Kuliah Sistem Peradilan Pidana, (Semarang: Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, 2010)

Soeroso, R. Praktik Hukum Acara Perdata : Tata Cara dan Proses Persidangan, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993)

Soesilo, R, Hukum Acara Pidana Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana Menurut KUHAP Bagi Penegak Hukum, (Bogor: Politeia, 1982)

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI press, 1986)

Sudarto, Hukum Pidana I Edisi Revisi, (Semarang: Yayasan Sudarto Fakultas Hukum Undip Semarang, 2013)

Wahid, Fathul, Kamus, Istilah Teknologi Informasi, (Yogyakarta : Andi Offset, 2002)

Yesmil Anwar dan Adang, Kriminologi. (Bandung : PT Refika Aditama,2013)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat

Perjanjian Kerjasama Nomor: 402/DJU/HM.01.1/4/2020, Nomor:KEP-17/E/Ejp/04/2020, Nomor: PAS-08.HH.05.05 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Persidangan Melalui *Teleconference*.

Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

Surat Penetapan Nomor 354/Pid.B/2002/PN.Jakarta Selatan

Surat Penetapan Nomor 08/Pid.HAM Ad Hoc 2002/PN Jakarta Pusat

Surat Penetapan Nomor 547/Pid.B/2003/PN.Jakarta Pusat

Surat Penetapan Nomor 224/Pid.B/2003/PN.Denpasar

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban

JURNAL DAN ARTIKEL

Erdianto, Dian & Soponyono, Eko (2015). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Pemberian Keterangan Saksi Melalui Media *Teleconference* Di Indonesia. *Law Reform Volume 11 No.1*.

Hardiansyah, Gusliana dan Erdiansyah (2013), Keabsahan Keterangan Saksi Melalui *Teleconference* Dalam Pembuktian Di Persidangan Pidana, Repository Universitas Riau.

Lumbanraja, Anggita Doramia (2020). Perkembangan Regulasi Dan Pelaksanaan Persidangan Online Di Indonesia Dan Amerika Serikat Selama Pandemi Covid-19. *Crepindo Volume 02 No.01*.

Tintington, Swindy A.J (2014). Kesaksian Saksi Melalui *Teleconference* Dalam Persidangan Di Pengadilan. *Lex et Societatis Volume II No.8*.

SUMBER LAIN

Permana, I Gede A, Tinjauan Yuridis Tentang Pemeriksaan Saksi Jarak Jauh (Teleconference) Dalam Pemeriksaan Perkara Pidana Di Persidangan, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2017)

Sharfina, Lulu Azmi, Keabsahan kesaksian (keterangan saksi) yang disampaikan secara *teleconference* di persidangan, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2018)